**PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN INTEGRITAS NEGARA KESATUAN RI**

1. Latar Belakang

Sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai puncaknya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Waktu itu Jepang mengalami kekalahan dengan sekutu, sehingga keadaan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan proklamasi inilah Negara Indonesia terlahir.

Sebagai Negara yang baru saja terbentu, tentunya Indonesia masih rentan dengan penjajahan bangsa asing maupun pemberontakan bangsa sendiri. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru sebentar ini mendapatkan gangguan dari Belanda. Awalnya bangsa Indonesia menyabut baik kedatangan Belanda, namum setelah mengetahui Belanda diboncengi Sekutu, rakyat Indonesia merasa terganggu. Dari situlah mulai terjadi perlawanan diberbagai daerah di Indonesia. Perlawanan bangsa Indonesia ini dikalukan secara fisik maupun secara diplomasi.

B.        Bentuk Perjuangan Menghadapi Pasukan Sekutu dan Nica

Ø  Perjuangan secara  fisik

1.             Peristiwa 10 November di Surabaya

Surabaya merupakan kota pahlawan. Surabaya menjadi ajang pertempuran yang paling hebat selama revolusi mempertahankan kemerdekaan, sehingga menjadi lambang perlawanan nasional. Peristiwa di Surabaya merupakan rangkaian kejadian yang diawali sejak kedatangan pasukan Sekutu tanggal 25 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigjen A.W.S. Mallaby.

Setelah mendarat di Surabaya, NICA berusaha menjadikan Hotel Yamato sebagai markas. Mereka mengibarkan bendera Belanda, “merah-putih-biru” di tiang puncak hotel Yamato. Hal ini sontak membuat para pemuda marah. Secara spontan mereka menyerbu masuk hotel dan menurunkan bendera itu, kemudian merober bagian yanf berwarna biru lalu bendera pun dikibarkan lagi menjadi merah putih. Sejak saat itu  bentrokan antara pejuang dan pasukan Sekutu terjadi hampir di tiap sudut kota Surabaya.

Pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadi pertempuran yang hebat di Gedung Bank Internatio di Jembatan Merah. Pertempuran itu menewaskan Brigjen Mallaby. Akibat meninggalnya Brigjen Mallaby, Inggris memberi ultimatum, isinya agar rakyat Surabaya menyerah kepada Sekutu. Secara resmi rakyat Surabaya, yang diwakili Gubernur Suryo menolak ultimatum Inggris. Akibatnya pada tanggal 10 November 1945 pagi hari, pasukan Inggris mengerahkan pasukan infantri dengan senjatasenjata berat dan menyerbu Surabaya dari darat, laut, maupun udara.

Rakyat Surabaya tidak takut dengan gempuran Sekutu. Bung Tomo memimpin rakyat dengan berpidato membangkitkan semangat lewat radio. Pertempuran berlangsung selama tiga minggu. Akibat pertempuran tersebut 6.000 rakyat Surabaya gugur. Pengaruh pertempuran Surabaya berdampak luas di kalangan internasional, bahkan masuk dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 7-13 Februari 1946.

2.             Bandung Lautan Api

Terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api diawali dari datangnya Sekutu pada bulan Oktober 1945. Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh ultimatum Sekutu untuk mengosongkan kota Bandung. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama isinya kota Bandung bagian Utara selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945 dikosongkan oleh para pejuang. Ultimatum tersebut tidak ditanggapi oleh para pejuang. Selanjutnya tanggal 23 Maret 1946 Sekutu mengeluarkan ultimatum kembali. Isinya hampir sama dengan ultimatum yang pertama. Menghadapi ultimatum tersebut para pejuang kebingungan karena mendapat dua perintah yang berbeda. Pemerintah RI di Jakarta memerintahkan agar TRI mengosongkan kota Bandung. Sementara markas TRI di Yogyakarta menginstruksikan agar Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya para pejuang mematuhi perintah dari Jakarta. Pada tanggal 23-24 Maret 1946 para pejuang meninggalkan Bandung. Namun, sebelumnya mereka menyerang Sekutu dan membumihanguskan kota Bandung. Tujuannya agar Sekutu tidak dapat menduduki dan memanfaatkan sarana-sarana yang vital. Peristiwa ini dikenal dengan Bandung Lautan Api. Sementara itu para pejuang dan rakyat Bandung mengungsi ke luar kota.

3.             Pertempuran Ambarawa

Pertempuran Ambarawa terjadi tanggal 20 November sampai tanggal 15 Desember 1945, antara pasukan TKR dan Pemuda Indonesia melawan pasukan Sekutu (Inggris). Pertempuran Ambarawa dimulai dari insiden yang terjadi di Magelang pada tanggal 26 Oktober 1945. Pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara Sekutu. Pertempuran Ambarawa mengakibatkan gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Resimen Banyumas. Posisi Letkol Isdiman kemudian digantikan oleh Letkol Soedirman. Kota Ambarawa berhasil dikepung selama 4 hari 4 malam oleh pasukan RI. Mengingat posisi yang telah terjepit, maka pasukan Sekutu meninggalkan kota Ambarawa tanggal 15 Desember 1945 menuju Semarang. Keberhasilan TKR mengusir Sekutu dari Ambarawa menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI.

4.             Pertempuran Medan Area

Pada tanggal 9 Oktober 1945 tentara Inggris yang diboncengi oleh NICA mendarat di Medan. Mereka dipimpin oleh Brigjen T.E.D Kelly. Awalnya mereka diterima secara baik oleh pemerintah RI di Sumatra Utara sehubungan dengan tugasnya untuk membebaskan tawanan perang (tentara Belanda). Sebuah insiden terjadi di hotel Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Saat itu seorang penghuni hotel (pasukan NICA) merampas dan menginjak-injak lencana Merah Putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan para pemuda. Akibatnya terjadi perusakan dan penyerangan terhadap hotel yang banyak dihuni pasukan NICA. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Sekutu memasang papanpapan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut kota Medan. Sejak saat itulah Medan Area menjadi terkenal. Pasukan Inggris dan NICA mengadakan pembersihan terhadap unsur Republik yang berada di kota Medan. Hal ini jelas menimbulkan reaksi para pemuda dan TKR untuk melawan kekuatan asing yang mencoba berkuasa kembali. Pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebingtinggi diadakan pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan tersebut memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area.

5.             Peristiwa Merah Putih di Manado

Kabar tentang proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal Pejuanggal 17 Agustus 1945 sampai ke Manado. Kabar itu membuat para pemuda dan pejuang di Manado gembira. Di lain pihak, pasukan sekutu yang membara serta NICA masuk ke Manado dan berusaha untuk membebaskan pasukan KNIL yang menjadi tawan perang. Tetapi NICA lalu mempersenjatai para mantan pasukan KNIL itu. Pasukan itu dijuluki “Pasukan Tangsi Putih”.

Setelah sekutu resmi menyerahkan Manado ke tangan kekuasaan NICA pada bulan Desember 1945, NICA langsung melakukan pembersihan dengan menangkap para pemimpin pergerakan perjuangan agar kedudukan mereka di Manado aman. Pasukan KNIL di Manado tidak seluruh loyal pada NKRI, merekan dijuluki “Pasukan Tangsi Hitam”.

Pasukan Tangsi Hitam bergabung dengan Pasukan Pemuda Indonesia (PPI) dan merencanakan untuk mengusir NICA dari Manado. Tetapi, rencana PPI itu tercium oleh NICA, akhirnya para pemimpin PPI ditangkap serta  seluruh peluru dan amunisi Pasukan Tangsi Hitam disita oleh NICA., pasukan tetap punya senjata tetapi tanpa peluru dan amunisi.

Tetapi rencan perlawan pada NICA tetap dilaksanakan. Dengan perencanaan yang matang, serangan ke markas NICA dan Pasukan Tangsi Putih di Teling di lancarkan. dengan bergerak di malam hari membuat formasi huruf “L”, Pasukan PPI berhasil masuk ke markas NICA dan berhasil menguasai markas serta membebaskan para pemimpin PPI yang ditawan NICA. para pejuang merobek bagian biru Belanda sehingga sang merah putih berkibar di sana. Para pejuang juga berhasil mengalahkan NICA di Tomohon dan Tondano.

Setelah kebehasilan itu, para pejuang langsung membentuk pemerintahan sipil dengan B.W. Lapisan sebagai Residennya kabar kemenangan ini segera di kiri ke Yogjakarta. Kabar ini juga sekaligus menipis propaganda Belanda bahwa Proklamasi Kemerdekaan RI hanya berlaku di Jawa saja, dan klaim akan mitos Verbond Minahasa – Nederland (persahabatan Belanda-Minahasa) yang telah ada sejak 10 Januari 1969 gugur sudah.

Ø  Perjuangan secara diplomatik

1.         Perjanjian Linggarjati

Perjanjian Linggarjati dilakukan pada tangga 10 November 1946 di Linggarjati, dekat Cirebon. Dalam Perjanjian ini, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir sedangkan Belanda diwakili oleh Prof. Scermerhorn. Perjanjiantersebut dipimpin oleh Lord Killearn, seorang diplomat Inggris.

Berikut ini beberapa keputusan Perjanjian Linggarjati.

a.       Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatra.

b.      Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.

c.        Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Dalam perkembangan selanjutnya, Belanda melanggar ketentuan Perjanjian tersebut dengan melakukan agresi militer I tanggal 21 Juli 1947.

2.         Perjanjian Renvile

Dalam upaya membantu menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda maka DK PBB mendesak diadakannya gencatan senjata yang terjadi 4 Agustus 1947 serta membentuk komisi tiga Negara (KTN), Negara-negara tersebut adalah :  
a) Australia (tunjukan Indonesia), diwakili oleh Richard Kirby.  
b) Belgia (tunjukan Belanda) diwakili oleh Paul Van Zeelan.  
c) Amerika Serikat (netral), diwakili oleh Dr. Frank Graham.

Atas usul KTN maka pada tanggal 8 Desember 1947 dilaksanakan Perjanjian antara Indonesia dan Belanda di atas kapal Renville milik AS yang sedang berlabuh di Jakarta.  
Delegasi Indonesia terdiri atas PM. Amir syarifuddin, Mr. Ali Sastroamidjoyo, Dr. Tjoa sik len, Mr. Roem, Haji Agus Salim, Mr. Nasrun dan Ir. Djuanda. Delegasi Belanda terdiri atas Abdul Kadir Widjoyoatmojo, Jhr. Van Vredenburgh, Dr.Soumokil, Pangeran Kartanegara dan Zulkarnaen.

Setelah melalui perdebatan dan permusyawaratan dari tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Juni 1948 maka diperoleh persetujuan Renville.

Pokok-pokok isi persetujuan sebagai berikut:

a.      Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai kedaulatannya diserahkan kepada RIS yang segera dibentuk.

b.      RIS mempunyai pendudukan yang sejajar dengan Negara Belanda dalam Uni Indonesia-Belanda.

c.       RI akan merupakan Negara bagian dari RIS

d.      Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintahan federal sementara.

e.       Pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI

Kerugian-kerugian yang diderita Indonesia dari perjanjian Renville adalah :

a.       Indonesia terpaksa menyetujui dibentuknya Negara Indonesia serikat melalui masa peralihan.

b.      Indonesia kehilangan sebagian daerahnya karena garis Van Mook terpaksa harus diakui sebagai daerah kekuasaan Belanda

c.       Pihak republik harus menarik seluruh pasukannya yang ada di daerah kekuasaan Belanda dan dari kantong-kantong gerilya masuk daerah RI.

Akibat buruk bagi pemerintah RI dengan penandatanganan perjanjian ini adalah :

a.       Wilayah RI menjadi semakin sempit dan dikurung oleh daerah-daerah kekuasaan Belanda.

b.      Timbulnya reaksi keras dikalangan pemimpin-pemimpin RI mengakibatkan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin yang dianggap telah menjual Negara kepada Belanda.

c.       Perekonomian Indonesia diblokade secara ketat oleh Belanda.  
d. Indonesia terpaksa harus menarik mundur kesatuan-kesatuan militer dari daerah-daerah gerilya, kemudian hijrah ke wilayah RI yang berdekatan.

Kabinet Amir syarifuddin jatuh dan digantikan kabinet Hatta. Amir syarifuddin yang kecewa akhirnya menjadi oposisi kabinet Hatta dan bersama Muso mengobarkan pemberontakan PKI di Madiun pada bulan September 1948, saat bangsa Indonesia sibuk menghadapi ancaman agresi militer Belanda II.

3.         Perjanjian Roem Royen

Perjanjian ini merupakan Perjanjian pendahuluan sebelum KMB. Salah satu kesepakatan yang dicapai adalah Indonesia bersedia menghadiri KMB yang akan dilaksanakan di Den Haag negeri Belanda. Untuk menghadapi KMB dilaksanakan konferensi inter Indonesia yang bertujuan untuk mengadakan pembicaraan antara badan permusyawaratan federal (BFO/Bijenkomst Voor Federal Overleg) dengan RI agar tercapai kesepakatan mendasar dalam menghadapi KMB.

Komisi PBB yang menangani Indonesia digantikan UNCI. UNCI berhasil membawa Indonesia-Belanda ke meja Perjanjian pada tanggal 7 Mei 1949 yang dikenal dengan persetujuan Roem-Royen (Roem-Royen Statement) yang isinya antara lain :  
a. Belanda harus pergi meninggalkan daerah Yogyakarta  
b. Presiden dan wakil presiden kembali ke Yogyakarta  
c. Panglima mengembalikan mandatnya kepada pemerintah Presiden Soekarno

4.         Konferensi Inter Indonesia

Bersamaan dengan di adakannya Konferensi Inter Indonesia , di Jakarta berlangsung prtemun wakil-wakil republic Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau Badan Permusyawaratan dengan Belanda dibawah pengamatan UNCI. Pertempuran tersebut menghasilkan penggentian permusuhan kedua belah pihak . Presiden Soekarno sendiri pada 3 Agustus 1949 melalui radio mengeluarkan Radio untuk menghentikan tembak-menembak. AHJ lovink, Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda sebagai Panglaima Tertinggi Angkatan Perang Belanda Indonesia, di hari yang sama, memerintahkan kepada pasukan untuk meletakkan senjata. konferensi Inter-Indonesia sendiri berlangsung di Yogjakartapada tanggal 19-22 Juli 1949, dipimpin oleh Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta.

konferensi empat hari ini menghasilkan beberapa keputusan, yaitu:

a.       Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berdasarkan demokrasi dan federalism

b.      RIS akan dipimpin oleh seorang presiden dan dibantu oleh mentri-mentri

c.       RIS akan menerima kedaulatan baik dan Republik Indonesia Maupun Kerajaan Belanda

d.      Angkatan perang semata-mata hak pemerintah RIS

e.      Negara-negara bagian tidak akan mempunyai angkatan perang sendiri

Pertemuan ke-dua konferensi Inter-Indonesia diadakan di Jakarta pada 30 Juli 1949, dan menghasilkan beberapa keputusan yaitu:

a.       bendera RIS adalah sang Merah-Putih

b.      lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya

c.       Bahasa resmi RIS adalah Bahasa Indonesia

Wakil RI dan BFO ber hak memilih Presiden RIS. Negara bagian yang berjumlah 16 berhak mengisi keanggotaan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Kedua Majelis ini juga setuju untuk membentuk panitin persiapan nasional, yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan KMB. Selain itu, dibicarakan soal posisi TNI yang menjadi inti dari pembentukan Angkatan Parang Republik Indonesia  Serikat (APRIS) yang anggota-anggotanya terdiri atas bekas koninklijk Nederlands Leger (KNIL) dan anggotanya Koninklyeke Leger (KL) akan kembali ke Belanda. Saat itu, terjadi pembrontakan di berbagai daerah, seperti pemberontakan KNIL di Bandung, APRA-nya Westerling, Pembeontakan Andi Aziz di Makassar, dan Pemerontakan RMS.

5.         Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan tindak lanjut dari Perundingan Roem-Royen. Sebelum KMB dilaksanakan, RI mengadakan pertemuan dengan BFO (Badan Permusyawaratan Federal). Pertemuan ini dikenal dengan dengan Konferensi Inter-Indonesia (KII) Tujuannya untuk menyamakan langkah dan sikap sesama bangsa Indonesia dalam menghadapi KMB.

Konferensi Inter-Indonesia diadakan pada tanggal 19 - 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 di Jakarta. Pembicaraan difokuskan pada pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Keputusan yang cukup penting adalah akan dilakukan pengakuan kedaulatan tanpa ikatan politik dan ekonomi.

Pada bidang pertahanan diputuskan:

a.       Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah Angkatan Perang Nasional,

b.      TNI menjadi inti APRIS, dan

c.       negara bagian tidak memiliki angkatan perang sendiri.

KMB merupakan langkah nyata dalam diplomasi untuk mencari penyelesaian sengketa Indonesia – Belanda. Kegiatan KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dalam KMB tersebut dihadiri delegasi Indonesia, BFO, Belanda, dan perwakilan UNCI.

Berikut ini para delegasi yang hadir dalam KMB:

a.       Indonesia terdiri dari Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof.Dr. Mr. Soepomo

b.      BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak.

c.       Belanda diwakili Mr. van Maarseveen.

d.      UNCI diwakili oleh Chritchley.

Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, akhirnya KMB menghasilkan beberapa keputusan berikut:

a.       Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

b.       Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.

c.       Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.

d.      Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda.

e.      Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS.

f.        Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.

Pada tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan penandatanganan pengakuan kedaulatan secara bersamaan di Belanda dan di Indonesia. Di negeri Belanda, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Dress, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J. A. Sassen, dan Drs. Moh. Hatta, bersama menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Sedangkan di Jakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.J. Lovink menandatangani naskah pengakuan kedaulatan.

C.        Perjuangan dalam mempertahankan konflik dalam negeri

1.            Pemberontakan DI/TII diberbagai daerah.

Pada dasarnya walaupun namanya sama, antara gerakan DI/TII di satu daerah tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan gerakan DI/TII yang meletus di daerah lainnya, karena masing-masing mempunyai latar belakang dan pemimpin yang berbeda.

a)      Gerakan DI/TII di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM. Kartosuwiryo mempunyai akar persoalan militer dan politik yaitu perjanjian Renville antara RI dengan Belanda serta keinginan mendirikan negara yang berdasarkan Islam. Pemberontakan yang berlangsung sejak 1949 baru dapat dipadamkan tahun 1962 lewat operasi Baratayuda dengan siasat Pagar Betis.

b)      Gerakan DI/TII di Jawa Tengah baik yang meletus di daerah Tegal-Brebes-Pekalongan yang dipimpin oleh Amir Fatah, maupun yang meletus di Kebumen yang dipimpin oleh Kyai Mahfudz Abdur Rahman atau Kyai Somo Langu yang mendapat dukungan dari anggota batalyon 426 di Kudus dan Magelang. Menghadapi aksi DI/TII di Jawa Tengah, pemerintah membentuk operasi pusat yang disebut Gerakan Banteng Negara yang diantaranya adalah operasi Merdeka Timur yang menghancurkan Gerakan DI/TII di wilayah Jawa Tengah bagian selatan-Tengah.

c)       Gerakan DI/TII di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Penyebabnya adalah menyangkut rasionalisasi/demobilisasi tentara oleh Pemerintah di seluruh Indonesia.

 Ibnu Hajar alias Haderi bin Umar alias Angli adalah seorang mantan letnan dua TNI yang kemudian memberontak dan menyatakan gerakannya sebagai bagian DI/TII Kartosuwiryo. Dengan pasukan yang dinamakan Kesatuan Rakyat yang tertindas, Ibnu Hajar menyerang pos-pos kesatuan tentara di Kalimantan Selatan dan melakukan tindakan pengacauan pada bulan Oktober 1950, pemerintah masih memberikan kesempatan kepada Ibnu Hajar untuk menghentikan petualangan secara baik-baik. Ia dan kesatuannya pernah menyerahkan diri tetapi setelah menerima perlengkapan, Ibnu Hajar melarikan diri dan melanjutkan pemberontakannya. Perbuatan itu dilakukan lebih dari satu kali sehingga pemerintah memutuskan untuk mengadakan operasi. Gerakan perlawanan baru berakhir pada bulan Juli 1963. Ibnu Hajar dan anak buahnya menyerah. Pada tanggal 22 Maret 1965 pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati kepada Ibnu Hajar.

d)      Gerakan DI/TII di Aceh, gerakan ini dipimpin oleh Tengku Daud Beureuh, mantan Gubernur militer DI Aceh dan Ketua PUSA. Issu sentral yang menjadi penyebabnya adalah masalah otonomi daerah dan perimbangan pusat dengan daerah. Sedangkan pemicunya adalah diturunkannya status Aceh dari Daerah Istimewa (setingkat propinsi) menjadi Karisidenan di bawah propinsi Sumatera Utara. Pemberontakan yang berlangsung sejak th. 1953 dapat diakhiri th. 1962 melalui Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang salah satunya adalah pemberian amnesti pada Daud Beureuh.

2.            Penumpasan pemberontakan PKI Madiun

Perjanjian Renville yang isinya sangat merugikan pihak Indonesia, telah menyebabkan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Setelah berhenti dari kabinet Hatta, ia beralih haluan dengan bergabung pada FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang berhaluan sosialis dan menempatkan diri sebagai oposisi kabinet Hatta.  
Kelompok FDR ini dalam upaya merebut kekuasaan, melakukan berbagai cara seperti penculikan dan pembunuhan terhadap lawan politik. Langkah kelompok ini semakin merajalela setelah datangnya Muso dari Sovyet, yaitu dengan terjadinya peristiwa tanggal 18 September 1948 FDR/PKI memproklamasikan berdirinya "Sovyet Republik Indonesia" di Madiun.

Pecahnya pemberontakan ini ditindaklanjuti pemerintah dengan mengangkat Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur militer daerah Surakarta, Pati dan Madiun, serta Kolonel Sungkono sebagai Panglima Divisi Jawa Timur untuk melaksanakan operasi militer. Dengan dukungan oleh rakyat, tanggal 30 September 1948 pemberontakan PKI Madiun bisa dipatahkan, Muso mati tertembak sedangkan Amir Syarifudin dihukum mati.

3.       Pemberontakan Andi Azis di Sulawesi Selatan (Makassar)

Kapten Andy Azis adalah bekas perwira KNIL yang telah diterima dalam APRIS dan bertugas di Sulawesi Selatan. Pemberontakan Andy Azis terkait dengan rencana pemerintah RIS mendatangkan 1 Bataliyon APRIS ke Sulawesi Selatan yang saat itu tidak aman karena sering dilanda demonstrasi baik oleh yang pro maupun yang anti negara federal. Rencana itu ditentang oleh Andy Azis yang bermuara pada pemberontakan Andy Azis bulan April 1950.

4.       RMS (Rep. Maluku Selatan)

Sejak bulan April 1950 yang dipelopori oleh Mr. DR. Ch. R.S. Soumokil (mantan jaksa agung NIT). Menghadapi gerakan RMS yang merupakan gerakan separatis, pemerintah berusaha menyelesaikannya secara damai dengan mengirim misi Dr. Leimena. Karena gagal maka pemerintah menghadapinya dengan kekerasan senjata melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kol. Alex Kawilarang.

5.       APRA di Bandung maupun Sulawesi Selatan

Yang dipimpin oleh Kapten Reymond Westerling pada bulan Januari 1950. Penyebabnya adalah karena tuntutan Westerling agar APRA (eks KNIL) yang di Jawa Barat dijadikan tentara Negara Jawa Barat serta penolakan pembubaran Negara Jawa Barat, ditolak oleh Pemerintah RIS